

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kekayaan alam Indonesia mempunyai potensi tinggi untuk pengembangan ekonominya. Pemanfaatan sumber daya alam dan manusia secara efektif dapat meningkatkan produk domestik bruto nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Modal, teknologi, dan staf yang kompeten semuanya diperlukan agar hal ini terwujud. Dengan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal, Indonesia akan meningkatkan produktivitas dan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Menurut Sari dan Sugiharti (2022) pertumbuhan ekonomi berkelanjutan membutuhkan produktivitas tinggi. Produktivitas yang tinggi dapat dicapai dengan memanfaatkan teknologi terkini. Dibutuhkan tenaga kerja ahli untuk menggunakan teknologi yang maju. Maka dari itu, pekerja memainkan peran kunci dalam peningkatan produktivitas. Semakin banyak pekerja, semakin tinggi juga produktivitas. Sehingga diperlukan partisipasi angkatan kerja yang tinggi untuk mengoptimalkan produktivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Salah satu indikator kesejahteraan ekonomi suatu wilayah adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK ialah ukuran aktivitas ekonomi penduduk usia kerja. TPAK menggunakan rasio angkatan kerja terhadap jumlah orang yang secara aktif mencari pekerjaan untuk mendapatkan wawasan tentang ekonomi lokal dan pasar tenaga kerja (Sari & Sugiharti, 2022). Namun, setiap wilayah memiliki perbedaan jumlah angkatan kerja dan keadaan ekonomi yang menyebabkan perbedaan TPAK di setiap wilayah.

Berikut adalah tabel yang memperlihatkan TPAK Pulau Sumatera tahun 2019-2024.

Tabel 1.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Pulau Sumatera Tahun 2019-2024 Dalam Satuan Persen (%)

No	Provinsi	TPAK						Rata-Rata
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Aceh	63,13	65,1	63,78	63,5	64,77	65,11	64,23
2	Sumatera Utara	70,37	68,67	69,1	69,53	71,06	71,36	70,02
3	Sumatera Barat	67,88	69,01	67,72	69,3	69,61	70,28	68,97
4	Riau	64,94	65,24	65,03	63,86	64,45	66,33	64,98
5	Jambi	65,79	67,79	67,17	67,84	68,75	67,09	67,41
6	Sumatera Selatan	67,67	68,65	68,77	69,31	70,72	70,82	69,32
7	Bengkulu	70,09	71,73	69,75	69,81	70,91	71,71	70,67
8	Lampung	69,06	70,16	69,35	70,06	70,04	70,41	69,85
9	Kepulauan Bangka Belitung	67,1	66,89	65,88	67,38	68,34	68,87	67,41
10	Kepulauan Riau	64,69	66,28	68,27	68,94	68,68	69,17	67,67
11	Rata-Rata Pulau Sumatera	67,07	68,27	67,48	67,95	68,73	69,12	68,10
12	Rata-Rata Indonesia	67,53	67,77	67,8	68,63	69,48	70,63	68,64

Sumber : BPS Data Diolah 2025

Dari Tabel 1.1 di atas, terdapat perbedaan TPAK di setiap provinsi, yang menunjukkan bahwa setiap wilayah memiliki keadaan ekonomi dan jumlah tenaga kerja yang berbeda. Provinsi Bengkulu selalu menduduki jajaran teratas TPAK Pulau Sumatera, sedangkan Provinsi Aceh merupakan yang terendah.

Sementara itu, Provinsi Jambi selama 6 tahun terakhir tidak pernah melampaui rata-rata TPAK di Pulau Sumatera kecuali tahun 2023, dan pada tahun 2024 memiliki TPAK terendah setelah Provinsi Aceh dan Riau. Jika dilihat dari rata-rata TPAK Indonesia, Provinsi Jambi selalu berada di bawah rata-rata, kecuali tahun 2020. Dalam keadaan tersebut, terdapat wacana pemekaran yang akan membagi Provinsi Jambi menjadi dua wilayah dan 6 wilayah administratif yang dapat menyebabkan perubahan TPAK nantinya. Sehingga penelitian ini akan berfokus pada TPAK di Provinsi Jambi.

Setiap tahun, semakin banyak penduduk Provinsi Jambi yang mendapatkan pekerjaan. Hal ini akan berdampak pada pertumbuhan TPAK tahunan yang pada

akhirnya akan meningkatkan produktivitas ekonomi. Tabel berikut menunjukkan proyeksi ketenagakerjaan di Provinsi Jambi dari tahun 2014 hingga 2024.

Tabel 1.2. Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Jambi Tahun 2015-2024

Tahun	Angkatan Kerja			Penduduk Usia Kerja (TK) (Jiwa)	TPAK (%) ((AK/TK)*100)
	Bekerja (Jiwa)	Pengangguran Terbuka (Jiwa)	Jumlah Angkatan Kerja (Jiwa)		
2015	1.550.403	70.349	1.620.752	2.450.464	66,14
2016	1.624.522	67.671	1.692.193	2.505.550	67,54
2017	1.657.817	66.816	1.724.633	2.554.395	67,52
2018	1.724.899	66.863	1.791.762	2.626.832	68,21
2019	1.683.575	71.212	1.754.787	2.667.255	65,79
2020	1.739.003	93.990	1.832.993	2.703.853	67,79
2021	1.746.840	93.754	1.840.594	2.740.177	67,17
2022	1.797.819	86.459	1.884.278	2.777.626	67,84
2023	1.802.264	85.576	1.887.840	2.745.834	68,75
2024	1.773.536	82.581	1.856.117	2.766.567	67,09
Rata- Rata	1.710.068	78.527	1.788.595	2.653.169	67,38

Sumber : BPS Provinsi Jambi Data Diolah 2025

Dari Tabel 1.2 tentang keadaan ketenagakerjaan di Provinsi Jambi di atas, terlihat bahwa jumlah angkatan kerja terus bertambah selama 10 tahun (2015-2024), namun masih terdapat penurunan dalam laju peningkatan TPAK setiap tahunnya (2017, 2019, 2021, dan 2024). Penurunan angkatan kerja tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yang menyebabkan produksi ekonomi berkurang dan TPAK terkena dampak setiap tahunnya karena pekerja usia kerja tertentu tidak dapat melakukan kegiatan ekonomi.

Baik Tabel 1.1 maupun Tabel 1.2 menunjukkan adanya fluktuasi TPAK dan dilihat dari rata-rata Indonesia dan Pulau Sumatera, TPAK di Provinsi Jambi masih lebih rendah. Oleh karena itu, jelas ada sejumlah kendala yang dihadapi penduduk Provinsi Jambi dalam upaya ikut berperan dalam perekonomian.

Ada banyak faktor yang dapat memengaruhi TPAK. Potensi penghasilan, pencapaian pendidikan, dan prospek investasi merupakan elemen yang berperan

dalam pilihan pekerjaan seseorang. Penawaran tenaga kerja dapat meningkat jika upah tinggi, tetapi dapat turun jika upah terlalu tinggi di sisi permintaan. Sebaliknya, memperoleh gelar sarjana mungkin membuat motivasi kerja tinggi karena memperoleh gaji tinggi, namun hal itu juga dapat membuat kurang produktif dalam jangka panjang karena lamanya waktu untuk menempuh pendidikan tinggi. Lebih banyak orang dipekerjakan oleh industri-industri yang sebagian besar bergantung pada tenaga kerja manusia, sedangkan lebih sedikit orang bekerja untuk industri-industri yang terutama mengandalkan modal sebagai akibat jenis investasinya.

Tingkat upah dapat menentukan keputusan seseorang untuk bekerja. Upah merupakan bentuk penghargaan atas kontribusi pekerja terhadap perusahaan. Setelah dikurangi hal-hal seperti kontribusi wajib dan pajak penghasilan, jumlah sisanya adalah gaji yang didasarkan pada harga pasar di tempat kerja (BPS, 2024a).

Penentuan upah minimum regional ditentukan berdasarkan biaya hidup dan kondisi ekonomi setempat (Sari & Sugiharti, 2022). Karenanya, upah minimum di kota-kota besar biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan kota-kota kecil. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan UMP untuk menghitung gaji di Provinsi Jambi. Pasalnya, pekerja tidak dapat mengembangkan diri dengan upah di bawah UMP yang merupakan upah minimum. Berikut adalah perkembangan UMP di Provinsi Jambi tahun 2019-2024.

Tabel 1.3. UMP di Provinsi Jambi Tahun 2019-2024 Dalam Satuan Rupiah

Tahun	UMP	Perkembangan (%)
2019	2.243.718	-
2020	2.630.162	17,22
2021	2.630.162	0,00
2022	2.698.940	2,61
2023	2.943.033	9,04
2024	3.037.121	3,20
Rata- Rata	2.697.189	6,42

Sumber : BPS Provinsi Jambi Data Diolah 2025

Menurut data BPS, Tingkat Upah Minimum Provinsi Jambi (UMP) meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023, UMP sebesar Rp 2.943.033 meningkat sebesar Rp 244.093 dari UMP tahun 2022 yang sebesar Rp 2.698.940. Selanjutnya, pada tahun 2024, UMP meningkat menjadi Rp 3.037.121, dengan kenaikan sebesar Rp 94.121 dari UMP tahun 2023. Kenaikan upah ini sejalan dengan tren kenaikan TPAK setiap tahun pada Tabel 1.2. walaupun masih terjadi penurunan di antaranya.

Terjadi pertumbuhan yang besar pada tahun 2020 yaitu 17,22 persen dari tahun 2019, tetapi pada tahun 2021 tidak terjadi pertumbuhan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2019 terjadi kebakaran dan peningkatan upah pada tahun 2020 dapat menandakan bahwa Provinsi Jambi sudah mengatasi dampaknya. Namun pada 2021 tidak terjadi pertumbuhan dapat dikarenakan dampak dari pandemi Covid-19 belum teratasi.

Terdapat perbedaan hasil tentang pengaruh upah terhadap TPAK yang ditemukan dalam penelitian terdahulu. Kadek Borgan Bonerri (2018) menemukan bahwa kenaikan upah minimum meningkatkan jumlah orang yang memilih untuk bekerja. Sementara Ayuni Mila Ningrum, Lisa Amelia, dan Deris Desmawan (2022) menemukan bahwa UMP berpengaruh negatif terhadap TPAK. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perubahan upah berpotensi memengaruhi pasar tenaga kerja.

Di satu sisi, lebih banyak pekerja potensial tersedia untuk mengisi posisi yang kosong dalam perekonomian sebagai akibat dari tingginya upah. Sementara turunnya pasokan pekerja dan peningkatan disinsentif untuk bekerja merupakan konsekuensi dari rendahnya upah. Permintaan tenaga kerja dapat ditingkatkan melalui upah rendah, sehingga menghasilkan produktivitas produksi yang lebih tinggi, dan dikurangi melalui tingkat upah yang tinggi, sehingga menyebabkan berkurangnya biaya produksi (Sholihah & Abdullah, 2024). Jadi, kita perlu menggali lebih jauh bagaimana gaji mempengaruhi partisipasi angkatan kerja di Provinsi Jambi.

Ada sejumlah faktor yang memengaruhi keputusan seseorang untuk bekerja, termasuk tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan. Kapasitas seseorang untuk

melakukan pekerjaannya dengan baik dapat ditingkatkan dengan pendidikan yang berkualitas tinggi. Menurut Bonerri (2018), pendidikan memberikan hasil positif dalam meningkatkan produktivitas kerja. Pendidikan tidak hanya mengembangkan pola pikir dan kreativitas, tetapi juga meningkatkan kemampuan berinovasi dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

Salah satu ukuran utama untuk menilai kualitas pendidikan masyarakat adalah rata-rata lama sekolah. RLS ini ialah statistik yang menggambarkan berapa lama waktu yang dibutuhkan rata-rata orang berusia 25 tahun ke atas untuk menyelesaikan sekolah menengah atas atau perguruan tinggi. Berikut adalah perkembangan RLS di Provinsi Jambi tahun 2019-2024.

Tabel 1.4. RLS Provinsi Jambi Tahun 2019-2024 Dalam Satuan Tahun

Tahun	RLS	Perkembangan (%)
2019	8,45	-
2020	8,55	1,18
2021	8,60	0,58
2022	8,68	0,93
2023	8,81	1,50
2024	8,90	1,02
Rata- Rata	8,67	1,04

Sumber : BPS Provinsi Jambi Data Diolah 2025

Di Provinsi Jambi, RLS selama 6 tahun terakhir selalu bertambah. RLS tahun 2019-2024 adalah 8,45 – 8,90 tahun, yang berarti rata-rata penduduk mengenyam pendidikan hingga kelas IX atau kelas 3 SMP (Jambi, 2024). Namun jika dilihat dari perkembangannya, RLS Provinsi Jambi diperkirakan akan menembus angka 9,00 yang mana menunjukkan rata-rata penduduk mengenyam pendidikan hingga kelas XI atau kelas 1 SMA/Sederajat pada tahun selanjutnya.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Munir Ikhsan (2016) memberikan bukti bahwa RLS berdampak positif pada TPAK. Selain meningkatkan kepercayaan diri, memperoleh gelar sarjana dapat mengarah pada prospek pekerjaan bergaji lebih tinggi. Namun, perlu diingat bahwa lama sekolah juga dapat menyebabkan penundaan partisipasi angkatan kerja karena individu masih

harus menyelesaikan pendidikan. Sehingga diperlukan analisis lebih lanjut tentang pengaruh pendidikan terhadap TPAK di Provinsi Jambi.

Selain pendapatan dan pendidikan, ada sejumlah faktor tambahan yang dapat memengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja, yaitu investasi. Pembentukan lapangan kerja baru dapat dirangsang oleh setiap investasi yang masuk. Penelitian ini menggunakan PMDN untuk melihat bagaimana dampaknya terhadap TPAK di Provinsi Jambi. Karena diduga PMDN dapat lebih memberdayakan masyarakat lokal daripada PMA. Berikut adalah perkembangan Investasi PMDN di Provinsi Jambi tahun 2019-2024.

Tabel 1.5. Investasi PMDN di Provinsi Jambi Tahun 2019-2024 Dalam Satuan Milyar Rupiah

Tahun	PMDN	Perkembangan (%)
2019	4.437,40	-
2020	3.511,70	-20,86
2021	6.204,20	76,67
2022	8.882,70	43,17
2023	8.939,00	0,63
2024	9.986,20	11,71
Rata- Rata	6.993,53	22,27

Sumber : BPS dan DPM & PTSP Data Diolah 2025

Provinsi Jambi juga melakukan penanaman modal untuk meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonominya. Nilai PMDN di Provinsi Jambi meningkat dari tahun 2020 hingga 2023. Jumlah investasi PMDN pada tahun 2020 sebesar Rp 3.511,7 miliar, meningkat menjadi Rp 6.204,2 miliar pada tahun 2021, Rp 8.882,7 miliar pada tahun 2022, dan Rp 8.939,0 miliar pada tahun 2023. Peningkatan ini dapat menggambarkan bahwa keadaan ekonomi di Provinsi Jambi semakin membaik dan memiliki potensi untuk dikembangkan. Sehingga dapat mendorong terciptanya lapangan kerja dan meningkatkan TPAK.

Namun pada tahun 2020 investasi PMDN mengalami penurunan sebesar 20,86 persen. Hal ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan kemampuan ekonomi, sosial, dan politik. Sehingga menyebabkan

menurunnya minat investasi, apalagi dampak Covid-19 tidak hanya melanda Provinsi Jambi tetapi seluruh Indonesia dan sebagian besar Negara di Dunia. Sehingga tidak hanya menyebabkan penurunan PMDN tetapi juga PMA.

Dampak investasi pada penyerapan tenaga kerja telah terbukti bervariasi berdasarkan penelitian sebelumnya. Ayuni Mila Ningrum, Lisa Amelia, dan Deris Desmawan (2022) menetapkan bahwa TPAK terkena dampak negatif dan tidak signifikan oleh PMDN. Sementara itu, Irwan Gani, Adi Wijaya, dan Rahmad Mas'ud (2021) menemukan bahwa investasi mempunyai efek yang dapat diabaikan serta menurunkan penyerapan tenaga kerja apabila dilihat secara langsung, namun mempunyai efek yang sedikit positif apabila dilihat secara tidak langsung, melalui pertumbuhan ekonomi.

Dengan mendorong perluasan lapangan kerja dan menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bagi penduduk setempat, investasi dapat memengaruhi penyerapan tenaga kerja dengan cara yang menguntungkan. Pasar kerja yang lebih canggih dan kompetitif merupakan salah satu manfaat investasi, yang juga dapat membawa kemajuan teknologi dan investasi modal. Meskipun demikian, penyerapan tenaga kerja lokal dapat berkurang ketika investasi difokuskan pada kegiatan padat modal daripada kegiatan padat karya. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut tentang dampak investasi terhadap TPAK diperlukan untuk memastikan tingkat penuh akibatnya di Provinsi Jambi.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan menguji hipotesis bahwa TPAK di Provinsi Jambi terpengaruh berbagai faktor independen, seperti tingkat upah, tingkat pendidikan, serta investasi. Variabel investasi digunakan untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian lainnya. TPAK digunakan sebagai variabel dependen dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul **"Analisis Pengaruh Tingkat Upah, Pendidikan, dan Investasi Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Jambi"**.

1.2. Rumusan Masalah

Mengingat penjelasan dan literatur yang disebutkan di atas, penelitian ini mengangkat beberapa permasalahan berikut:

1. Bagaimana perkembangan TPAK, upah, investasi, dan pendidikan di Provinsi Jambi dari tahun 2005-2023?
2. Bagaimana pengaruh tingkat upah, pendidikan, dan investasi terhadap TPAK di Provinsi Jambi?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan berikut didasarkan pada masalah yang diberikan di atas:

1. Menganalisis perkembangan TPAK, upah, investasi, dan pendidikan di Provinsi Jambi dari tahun 2005-2023
2. Menganalisis pengaruh tingkat upah, pendidikan, dan investasi terhadap TPAK di Provinsi Jambi.

1.4. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian dapat memberi berbagai masukan serta informasi kepada:

1. Akademis

Sejauh mana TPAK penting, dan variabel apa yang dapat mempengaruhinya, merupakan tujuan utama penelitian ini. Bagi akademisi yang tertarik untuk menyelidiki bagaimana faktor-faktor seperti pendidikan, investasi, dan tingkat gaji memengaruhi TPAK, penelitian ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat.

2. Praktis

Pembaca yang tertarik untuk melakukan studi pembandingan di masa mendatang dapat menganggap penelitian ini bermanfaat sebagai alat pembandingan. Selain itu, diharapkan dapat memberikan panduan bagi para pemimpin politik dan pemerintah kota dalam upaya mereka mengembangkan rencana untuk meningkatkan TPAK, menciptakan kesempatan kerja, dan meningkatkan mutu tenaga kerja.